

50.000 Petani Muda Dibantu Alsintan

JAKARTA (KR) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membidik 50.000 milenial untuk menjadi petani muda, yang kemudian diberikan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dengan fokus pada modernisasi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan Indonesia.

"Kami akan rekrut 50.000 (milenial), rencananya kami akan berikan traktor gratis yang gunakan teknologi tinggi untuk mengolah pertanian modern, dan itu akan kami libatkan pemuda," kata Mentan di Jakarta, Minggu (13/10).

Mentan menyampaikan hal itu ketika berdialog dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Amran mengatakan, saat ini sebanyak

3.000 mahasiswa telah dilibatkan, salah satunya di wilayah Sulsel untuk peningkatan produktivitas pertanian guna mewujudkan program swasembada pangan di Indonesia. Jumlah itu akan terus ditingkatkan hingga mencapai 50.000 petani muda.

la menuturkan, ribuan mahasiswa itu dirangkul dan difasilitasi dengan alat pertanian modern. Nantinya, mereka bisa menghasilkan pendapatan minimal Rp 10 juta perbulan. "Ada milenial generasi muda itu 52 persen, ini bonus demografi, ini harus kita getarkan dan getarannya harus sampai ke seluruh dunia nantinya lewat pertanian," ujar Mentan.

Lebih lanjut, ia mengajak para petani termasuk generasi muda, untuk sukseskan transformasi pertanian dari tradisional menjadi modern.

Mentan mengaku bahwa dirinya bertekad agar semua proses pertanian dapat dilakukan dengan teknologi dan juga mekanisasi. "Pertanian tidak bisa maju tanpa transformasi dari metode tradisional menuju modern. Ini adalah tantangan besar, tetapi dengan kerja keras dan inovasi, kita optimis bisa mencapainya," katanya.

Menurutnya, generasi muda harus terlibat dalam revolusi pertanian dengan menggunakan teknologi tinggi. Apalagi, Kementan akan memberikan bantuan alat pertanian modern, agar mereka lebih produktif dan efisien sebagai upaya untuk memastikan pertanian Indonesia semakin maju. "Pertanian adalah sektor strategis yang memiliki potensi besar pada penguatan ekonomi nasional," ujarnya pula.

(Ant/San)-f

Posisi

Dimana kandungan uap airnya, mendukung dalam proses pembentukan awan.

Dari beberapa hal di atas, yang mendukung kondisi cuaca berawan pada siang hingga malam mempengaruhi radiasi balik energi panas ke atmosfer yang tertahan oleh adanya awan-awan tersebut. Dampak dari kondisi tersebut cuaca menjadi panas (gerah).

"Dalam menyikapi kondisi ini masyarakat tidak perlu panik. Karena hal ini

merupakan sesuatu yang wajar terjadi di bulan Oktober. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan pada masa peralihan. Selain itu banyak mengkonsumsi air putih supaya tidak dehidrasi karena kondisi cuaca yang panas," ungkapnya.

Sementara itu saat ditanya soal dampak peningkatan suhu terhadap kondisi Gunung Merapi. Menurut Etik, secara meteorologis, kondisi cuaca saat ini memang

mendukung peningkatan suhu di wilayah itu. Namun, dirinya tidak dapat memberikan informasi lebih spesifik mengenai dampaknya terhadap aktivitas vulkanik Merapi. Karena secara umum kondisi cuaca panas saat ini dipengaruhi oleh posisi matahari dan faktor-faktor meteorologis lainnya. Namun, untuk mengetahui dampaknya secara spesifik terhadap suhu di lereng Merapi, perlu kajian lebih lanjut dari ahli vulkanologi.

(Ria)-f

Serukan

Menurutnya, penderitaan yang dihasilkan oleh peristiwa bom Bali adalah luka yang dalam, tetapi semua orang memiliki kesempatan untuk mengubahnya menjadi sumber kekuatan dan transformasi.

la menjelaskan, masyarakat yang menghadiri doa bersama sore hingga malam ini di Kuta berdiri bersama dalam solidaritas dan empati menyampaikan cinta kepada mereka yang terkena dampak tragedi ini. Namun, dalam pere-nungan doa kali ini, ia mengajak masyarakat untuk mengarahkan pandangan ke dalam hati menghadapi dua pilihan, apakah akan membiarkan kebencian, kekerasan dan penderitaan tersebut terus berputar dalam lingkaran yang tak berujung atau mengubahnya menjadi berkah dan perdamaian.

"Mari kita jadikan kenangan penderitaan ini sebagai titik awal untuk menginspirasi tindakan kita dan membangun dunia yang lebih harmonis," katanya.

Kemenhub

"Kami juga merencanakan membangun stasiun di seberang arah terminal. Jadi stasiun ini akan untuk jarak jauh, sedangkan di sebelah selatan itu untuk perjalanan lokal yang sehari bisa 24 perjalanan," katanya.

Stasiun Klaten merupakan bagian dari jalur kereta api pertama di Indonesia yang diresmikan pada 9 Juli 1871, dan juga stasiun pertama yang dibangun di antara Solo-Jogja. Menhub mengatakan beautilifikasi Stasiun Klaten dilakukan untuk mengedepankan kenyamanan pelanggan. "Harapannya Klaten memiliki titik-titik

yang cantik untuk dikembangkan sebagai pariwisata, termasuk yang punya hobi kuliner, di sini bisa ada kuliner yang enak seperti ayam atau garang asem," pungkasnya.

Sekda Klaten Jajang Prihono berharap semua perencanaan yang sudah diprogramkan bisa terealisasi baik itu tahap 1, 2 dan 3. Dengan demikian akan terjadi integrasi antara stasiun dan terminal. "Seperti tadi disampaikan pak menteri, akan ada pembangunan di sisi selatan, untuk yang lokal. Tentu menambah daya ekonomi masyarakat dan sampai tahap 3 diselesaikan,

yang berhenti di tengah jalan," ujarnya.

Kepala Stasiun Klaten Hari Setyo Jati menambahkan, kantong parkir sekarang ada di seberang jalan stasiun. Selain itu juga ditambah ruang tunggu di luar, sehingga masyarakat yang sedang menunggu kereta bisa nyaman. "Info yang kami terima dari pihak pelaksana tahap pertama selesai pada awal Desember. Selanjutnya, seperti dikatakan pak Menhub tadi, penambahan stasiun di sisi selatan, ada juga JPO yang dikerjakan pada tahun depan, menghubungkan stasiun utara dan stasiun selatan," jelasnya.

(Ant)-f

Ekspor

harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibandingkan harga beras di pasar global.

Hal yang perlu digali lebih jauh, pintu mana yang dapat meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia? Program penguatan aktivitas produksi pertanian telah dilakukan tiap tahunnya, termasuk subsidi pupuk, benih, pelatihan teknis, dan bentuk lainnya. Namun nilai turak tani tidak beranjak naik.

Dalam perspektif bisnis, kalau petani punya produk premium, produk bernilai ekonomi tinggi, dan ketemu dengan konsumen berdaya beli tinggi, maka harga tidak menjadi soal tapi kualitas produklah yang menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks ini, pasar domestik untuk produk premium hasil pertanian, termasuk beras, jumlah konsumen masih terbatas, terlebih kondisi sekarang ini laju daya beli kelas menengah tertahan bahkan merosot.

Posisi pasar domestik untuk beras organik

dan premium yang menyempit, maka opsi meningkatkan ekspor komoditas beras menjadi peluang. Kebijakan ekspor beras terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan nomor 21 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Salah satu hal yang diatur dalam kebijakan ini terkait ekspor beras. Banyak ragam beras yang dengan mudah diekspor dengan karakter beras yang diproduksi melalui sistem pertanian organik, ataupun beras yang diproduksi tidak melalui sistem pertanian organik (non organik) dengan tingkat kepecahan paling tinggi 5 persen.

Hal yang sering ditemui di lapangan, para petani, termasuk kelompok tani yang sudah paham menanam sistim organik, bahkan sudah memiliki sertifikat organik, masih tidak massif menanam padi dengan sistim organik

ini. Keluhan yang paling sering muncul adalah proses produksi yang lambat, tingkat produksi rendah, dan penjualan sulit karena harga relatif mahal.

Dalam perspektif jangka menengah dan panjang, masifkasi sistim organik menjadi pilihan rasional untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal yang perlu dimanfaatkan pada pangsa pasar luar negeri. Daya beli pasar luar masih terbuka, sementara dari sisi kebijakan perdagangan, pintu ekspor komoditas beras terbuka. Secara kelembagaan, pelaku ekspor untuk komoditas beras ini dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, perusahaan swasta. Artinya, kalau serius memperbaiki sisi produksi yang parallel memperkuat pasar ekspor, maka kenaikan kesejahteraan petani berpeluang lebih tinggi.

(Penulis adalah Dosen Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pengurus ISEI DIY, Peneliti Inspec)-f

(Ant/Obi)-f

UNTUK 150 WARGA DI BANJARNEGARA

Sido Muncul Operasi Katarak Gratis

BANJARNEGARA (KR) - PT Industri Jamu dan Farnasi Sido Muncul Tbk konsisten menyelenggarakan operasi katarak gratis bagi masyarakat kurang mampu sejak tahun 2011. Kali ini, bekerja sama dengan SPBK Perdami Pusat dan RSI Banjarnegara, Sido Muncul kembali menggelar baksos operasi katarak gratis bagi 150 penderita katarak di wilayah Banjarnegara dan sekitarnya Sabtu (12/10).

Bantuan secara secara virtual diserahkan oleh Direktur PT Industri Jamu dan Farnasi Sido Muncul Tbk Irwan Hidayat kepada Direktur RSI Banjarnegara dr H Arif Fadlullah Chonar disaksikan Bupati Banjarnegara Muhammad Masrofi SSos MSI, Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara Ismawan Setya Handoko SE dan pejabat terkait lainnya.

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat mengatakan, pelaksanaan operasi katarak gratis



KR-Istimewa

Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat saat pelaksanaan operasi gratis katarak.

adalah bagian dari komitmen Sido Muncul untuk membantu mengurangi jumlah angka penderita katarak di Indonesia yang terus bertambah setiap tahunnya.

"Kami ingin menggunakan dana yang kami miliki dari iklan dan promosi, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Pertama kali kami mengadakan operasi katarak gratis pada tahun 2011 bekerja sama dengan Yayasan Mata Hati, lalu saya membuat iklan tentang katarak," jelas Irwan.

Terhitung sejak 2011 hingga saat ini, Sido Muncul telah

mengoperasi lebih dari 56.000 mata di seluruh Indonesia. "Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap jumlah penderita katarak semakin kecil. Sebab orang itu kalau kehilangan penglihatan, 50 persen kualitas hidupnya hilang. Apalagi masalah katarak itu banyak dan terus bertambah setiap tahunnya. Untuk itu, kehadiran kami di sini bukan hanya membantu, melainkan juga memberitahu kepada orang-orang bahwa katarak bisa disembuhkan hanya dengan operasi," ujar Irwan Hidayat.

(Rsv/Ati)-f

Polri

Ketujuh satuan yang dimaksud adalah Korbrimob Polri, Korlantas, Bareskrim, Baharkam, Densus 88 Antiteror, Pusdokkes dan Divisi Hubungan Internasional Polri.

Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan, penambahan personel pengamanan mungkin terjadi bila euforia masyarakat meningkat menjelang pelantikan presiden dan wapres terpilih pada 20 Oktober 2024.

Sampai Minggu siang, kata Maruli, TNI belum menemukan adanya gelombang atau gerakan yang berpotensi menciptakan kondisi tidak kondusif terkait pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. "Tetapi tetap punya antisipasi yang profesional, saya kira nanti ada pekerjaan Paspampres juga, ring satu dan ring dua ada, ring tiganya juga ada," kata Maruli.

la mengatakan, pengamanan pelantikan

presiden dilakukan secara normal layaknya pelantikan seperti periode sebelumnya. Namun, jika nanti terjadi eskalasi dari gerakan yang mungkin berpotensi mengganggu proses pelantikan, maka penambahan personel akan dilakukan dari tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Selain itu, Maruli mengaku belum memiliki informasi lebih lanjut terkait ada atau tidaknya rencana konvoi usai pelantikan yang dilakukan presiden dan wakil presiden. "Keduanya yang baru dilantik pastinya juga padat jadwalnya setelah pelantikan oleh MPR, sidang, terus ke Istana, masih menerima tamu, jadi saya belum tahu," katanya.

Mengenai jumlah personel TNI saat proses pengamanan pelantikan, Maruli juga belum bersedia mengungkapkan.

(Ant/Obi)-f

Para

Kenaikan gaji pokok juga dalam rangka memperkuat martabat hakim di Indonesia sebagai negara hukum.

"Kita percaya, dengan pemenuhan tuntutan ini, akan tercipta kondisi yang lebih baik bagi para hakim untuk bekerja dengan integritas tinggi dan tanpa kompromi," ucapnya.

Dari perjalanan Aksi Cuti Bersama, Aji memetik pelajaran, harapan masyarakat Indonesia terhadap integritas hakim dan peradilan sangat tinggi. Menurutnya, inilah

tanggung jawab para hakim untuk membangun kembali citra positif peradilan di mata publik.

la berpesan kepada para hakim untuk menunjukkan, hakim yang bermartabat akan menjaga hukum dengan sebaik-baiknya, dan masyarakat akan berdaya dengan adanya sistem peradilan yang adil.

"Mari perkuat komitmen bersama untuk menjunjung tinggi integritas diri sebagai hakim dan menjaga integritas lembaga peradilan," kata Aji.

(Ant)-f

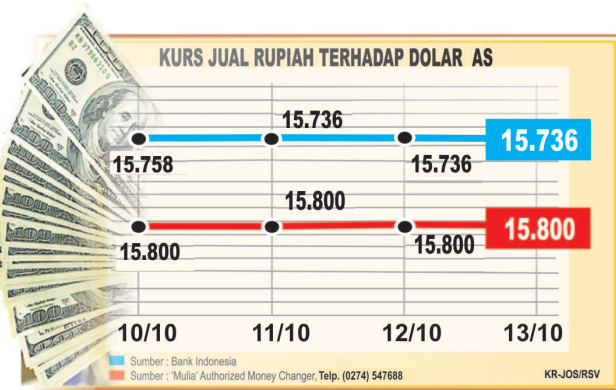
2024-2029

Sambungan hal 1

Anggota DPR yang dilantik bertambah dari 575 menjadi 580 orang, sedangkan anggota DPD RI bertambah dari 136 menjadi 152 orang dibandingkan periode sebelumnya.

Sebanyak 18 partai politik menjadi peserta Pemilu 2024. KPU menetapkan delapan partai politik yang memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen dengan perolehan kursi masing-masing PDIP (110 kursi), Partai Golkar (102 kursi), Partai Gerindra (86 kursi), PKB (68 kursi), PAN (48 kursi), Partai Demokrat (44 kursi), Partai NasDem (69 kursi) dan PKS (53 kursi).

(Ant/Obi)-f



Prakiraan Cuaca 14 Oktober 2024

Lokasi	Pagi	Siang	Cuaca Malam	Diri Hari	Suhu C	Kelembaban
Bantul					22-30	65-95
Sleman					22-29	65-95
Wates					22-29	65-95
Wonosari					22-30	65-95
Yogyakarta					22-30	65-95
Cerah	Berawan	Udara Kabin	Hujan Lokal	Hujan Petir		

Gratis : Arko

Sinergi Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam Bingkai Diplomasi Ekonomi



Aditya Maulana Hasymi
Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Amikom Yogyakarta

PROSES kerjasama luar negeri dalam kerangka kerja diplomasi ekonomi telah mengalami perluasan aktor. Negara tak lagi dominan sebagai pelaku yang mampu menginisiasi kolaborasi berbasis kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa, tenaga kerja, serta investasi ini. Kini, muncul

pemerintah daerah yang memastikan bahwa prosesnya akan lebih inklusif.

Setiap negara menggunakan strategi yang dirancang khusus untuk mengantisipasi persaingan ekonomi yang semakin ketat di era globalisasi saat ini. Dengan demikian, kemampuan Indonesia untuk berkomunikasi secara ekonomi menjadi sangat penting. Pemerintah menyadari bahwa diplomasi tidak lagi bertumpu pada negara, melainkan juga pada aktor hubungan internasional non-negara (non-state actors), salah satunya pemerintah daerah.

Pemerintah daerah saat ini harus aktif mencari peluang ekonomi untuk kemajuan nasional dan daerah mereka sendiri. Berkaca dari banyaknya kerja sama internasional yang melibatkan kepentingan daerah, pemerintah daerah menjadi mitra dalam diplomasi ekonomi. Kebijakan

otonomi daerah yang didukung oleh undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam Pasal 367 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan pemerintah daerah berpartisipasi secara aktif dalam diplomasi ekonomi di tingkat internasional.

Melihat begitu masifnya keterlibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari diplomasi internasional, diharapkan diplomasi ekonomi Indonesia akan semakin kuat dan integratif. Dengan demikian, diplomasi konvensional, yang selama ini berada di bawah kendali pemerintah pusat, harus diganti dengan melibatkan aktor non-negara, seperti pemerintah daerah. Partisipasi daerah dalam diplomasi, atau paradiplomasi, akan membantu pembangunan negara secara keseluruhan.

Kemandirian ekonomi menjadi salah satu tantangan utama yang

dihadapi banyak daerah di Indonesia. Di tengah dinamika global yang terus berubah, kolaborasi antar Pemerintah Daerah menjadi solusi strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu contoh menarik adalah sinergi antara Kota Yogyakarta, Indonesia dan Kota Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan. Dua daerah ini memiliki potensi yang besar untuk saling mendukung dalam mengembangkan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.

Kerjasama antar dua Pemerintah Daerah lintas batas negara ini, yakni Yogyakarta (Indonesia) dan Gyeongsangbuk-do (Korea Selatan), merupakan studi kasus nyata bagaimana desa dapat berperan penting dalam proses diplomasi ekonomi. Keduanya saling bersinergi dalam bingkai kerjasama sister city melalui proyek bertajuk Saemaul Undong, sebuah program pembangunan pedesaan yang menekankan pada: pola

partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, dan perbaikan lingkungan.

Setelah disepakati melalui Memorandum of Understanding pada tahun 2008, Yogyakarta mendapatkan bantuan dalam bentuk pendanaan guna pembangunan infrastruktur dan pendampingan intensif dari Gyeongsangbuk-do untuk mewujudkan kemandirian ekonomi. Beberapa desa di wilayah Yogyakarta menjadi tempat proyek ini dalam tiga fase. Pada fase pertama dari kurun waktu 2008-2011, program berlangsung di Desa Ngawen (Gunungkidul), Desa Salam Rejo (Kulon Progo), Desa Karangtulan (Bantul). Selanjutnya pada fase kedua di periode 2015-2020 berjalan di Desa Bleberan (Gunungkidul), Desa Ponjong (Gunungkidul), dan Desa Sumbermulyo (Bantul). Berkelanjutan pada fase ketiga dari 2023 hingga 2028 nanti bertempat di Desa

Nanggulan (Kulon Progo). Ketiga fase tersebut fokus pada penguatan ekonomi masyarakat melalui upaya budidaya jamur serta ikan, pendampingan keterampilan berbisnis, dan pembangunan infrastruktur sebagai stimulus peningkatan ekonomi desa.

Kerjasama antara Pemerintah Daerah Yogyakarta dan Gyeongsangbuk-do dalam Saemaul Undong Project tidak hanya bermanfaat bagi Masyarakat desa, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Selatan. Kerjasama ini menjadi contoh nyata bagaimana kerjasama antar daerah dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi penguatan sektor diplomasi ekonomi.

